



**RAHASIA**

## **BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

**Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550**

**Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,**

**Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)**

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.240/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2908/D2/09/2020 Tanggal 25 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 1 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mohamad Nur Afif, S.ST  
NIP : 198701152007011001  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian  
Pemda Provinsi DKI Jakarta T.A. 2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
  
2. Nama : Asep Dodi Sudrajat  
NIP : 197507071996031001  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan  
Persandian Pemda Provinsi DKI Jakarta T.A.  
2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : R. Boedi Setyawan  
NIP : 197009171998031006  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Siber dan Sandi  
Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
4. Nama : Tony Yudianto  
NIP : 198202272010011020  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Siber dan Sandi  
Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
5. Nama : Andrie Yuswanto  
NIP : 197812312011011014  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Siber dan Sandi  
Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
6. Nama : Reihan Adinata  
NIP : 198510132010011020  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I(III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi  
Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
7. Nama : Rycan Fahmi  
NIP : 198101032011011013  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Pelaksana Seksi Layanan Siber dan Sandi  
Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
8. Nama : Tanti Widyaningrum  
NIP : 198504012010012038  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)

- |    |             |   |  |
|----|-------------|---|--|
|    | Jabatan     | : | Pelaksana Seksi Pengendalian Siber dan Sandi                         |
|    | Instansi    | : | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik<br>Provinsi DKI Jakarta |
| 9. | Nama        | : | M. Taufik Hidayat  |
|    | NIP         | : | 197610192007011009   |
|    | Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a)  |
|    | Jabatan     | : | Pelaksana Seksi Tata Kelola Siber dan Sandi                          |
|    | Instansi    | : | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik<br>Provinsi DKI Jakarta |
| 8. | Nama        | : | Andi Susanto   |
|    | NIP         | : | 198107282011011005   |
|    | Pangkat/Gol | : | Penata (III/c)   |
|    | Jabatan     | : | Pelaksana Seksi Pengendalian Siber dan Sandi                         |
|    | Instansi    | : | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik<br>Provinsi DKI Jakarta |

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 29 s.d. 30 September 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
  - a. Profil Penyelenggara Persandian;
  - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
  - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (**telah dicabut**);
- b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- c. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- d. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- e. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas
- g. Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 50/SE/2018 tentang Kebijakan Penggunaan Intranet dan Internet Dalam dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- h. Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 44/SE/2018 tentang Dokumen Kelengkapan Sertifikat Elektronik;
- i. Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 7/SE/2014 tentang Penggunaan Subdomain [www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id) dan email @jakarta.go.id;
- j. Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 31/SE/2019 tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta;
- k. Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 52/SE/2019 tentang Penggunaan Domain Go Id Pada Website Pemerintah;
- l. Keputusan Kadis Kominfo Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- m. Daftar Program Kerja Persandian Diskominfo Provinsi DKI Jakarta;
- n. Daftar Sarana Prasarana Kerja Persandian Diskominfo Provinsi DKI Jakarta;
- o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA-SKPD 1.21 000 01 001 5 2 (Program Persandian untuk Pengamanan Informasi);

- p. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA-SKPD 1.16 000 01 015 5 2 (Program Pengembangan TIK/Teknologi Informasi dan Komunikasi);
- q. Dokumen Rincian Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2020 (Kode Organisasi/SKPD:21001000) 130 halaman;
- r. Dokumentasi kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menandatangani dokumen secara elektronik tentang dokumen komitmen bersama penanggulangan banjir dan longsor di Jabodetabekpunjur;
- s. Daftar SDM Persandian Diskominfo Provinsi DKI Jakarta;
- t. Link akses poster infografis <https://sijaki.jakarta.go.id/info/poster>
- u. Daftar Sosialisasi Keamanan Informasi dan Peningkatan Pengetahuan tentang Peran Persandian Tahun 2019 dan Tahun 2020 beserta foto dokumentasi kegiatan;
- v. Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda Kabupaten/Kota;
- w. Surat Permohonan Diklat Sandi Tahun 2019 kepada BSSN Nomor 1837/-072 tanggal 10 Mei 2019 dan Nomor 1939/-072 tanggal 17 Mei 2019;
- x. Tanda bukti pengiriman Surat dan Laporan Persandian Thn 2019 Provinsi DKI Jakarta kepada Direktur Proteksi Pemerintah BSSN dan Kepala BSSN (tembusan) melalui Kasa BSSN tanggal 23 Agustus 2020;
- y. Dokumen Laporan Tahunan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode Januari s.d. Desember 2019;
- z. Dokumen tindak lanjut hasil penyelesaian rekomendasi BSSN (file excel);
- aa. Dokumen            Laporan            Log            Analisa            Website  
INSPEKTORAT.JAKARTA.GO.ID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- bb. Dokumen            Laporan            Log            Analisa            Website  
PULAUERIBU.JAKARTA.GO.ID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- cc. Dokumen Laporan Log Analisa Website SMART-ONE.JAKARTA.GO.ID  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- dd. Dokumen Analisa Log Dishub;

- ee. Dokumen PoC Vulnerability Website ETKDBKD.JAKARTA.GO.ID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- ff. Rekapitulasi surat masuk dan keluar (file excel)
- gg. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1379/2004 tentang Tata Cara Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Arsip;
- hh. Nota Dinas Nomor 26.1/-073 7 tanggal 4 Maret 2019 tentang Usulan Jaring Retensi Arsip (JRA) Urusan Persandian;
- ii. *Certificate of Registration ISMS-ISO/IEC 27001:2013 LPSE, Effective date : 2018-12-13, Expiry date : 2021-12-12;*
- jj. *Certificate of Registration ISMS-ISO/IEC 27001:2013 Pusat Data, Issued : 11 December 2019, Expires : 10 December 2022;*
- kk. *Bureau Veritas Certification ISO 27001:2013 Siber, 11 November 2019;*
- ll. Publikasi kebijakan di website jdih.jakarta.go.id Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- mm. Publikasi kebijakan di website sijaki.jakarta.go.id ;
- nn. Foto dokumentasi 2 April 2019 “Implementasi Sertifikat Elektronik dalam rangka mendukung SPBE di Pemerintah Daerah”;
- oo. Foto dokumentasi 2 Mei 2019 “Implementasi Jaring Komunikasi Sandi dengan email bersandi dalam rangka mendukung keamanan informasi di Pemerintah Daerah” & “Sosialisasi dan Bimtek Penggunaan Email Sanapati.net”;
- pp. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 09 Tahun 2019 tentang *Computer Security Incident Response Team* Provinsi DKI Jakarta (Jakarta-CSIRT);
- qq. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang *Security Operation Center* (SOC);
- rr. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tim Keamanan Informasi ISO 27001:2013;
- ss. Network Security System Pemprov DKI Jakarta (1 Slide);
- tt. Daftar Sarana Prasarana Kerja Persandian Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta (Tempat Kegiatan Sandi dan Perlengkapan Pendukung);

- uu. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
  - vv. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
  - ww. Contoh surat yang ditandatangani secara elektronik Surat Undangan Nomor : 1978/-089.51 tanggal 8 Juli 2020 Invisible Signed by Reihan Adinata, Boedi Setiawan, Netti Herawati, Atika Nur Rahmania (ficture sign);
  - xx. Daftar Program Kerja Persandian Diskominfo Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
  - yy. SOP Pengendalian Akses Fisik No.Dok : DKIS.SMKI.SOP.14 Revisi : 1
  - zz. Dasar Hukum Terkait JKS (file rar)
  - aaa. Daftar Akun email sanapati.net (67 akun);
  - bbb. Berita Acara Kegiatan Perpindahan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) tanggal 12 September 2017;
  - ccc. Daftar Peralatan Sandi;
  - ddd. Foto Tulisan SR (Strong Room) pada pintu masuk ruang Strong Room;
  - eee. Dokumentasi media penyimpanan peralatan sandi;
  - fff. Aplikasi dari BSSN : Kriptosoft File Encryption;
  - ggg. Dokumen surat permohonan instalasi peralatan sandi file enkripsi Nomor : 60/-072 tanggal 8 Januari 2019;
  - hhh. Mapping ruangan TKS;
  - iii. Tampilan agenda distribusi surat;
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media *Video Conference*, *email* dan *chat* pada tanggal 29 September 2020 s.d. 30 September (sebagaimana bukti terlampir).
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **HASIL SEMENTARA** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berada pada **Level V** dengan kategori tingkat kepatuhan

**SANGAT TINGGI** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:

- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian  
Nilai: 95,29
- b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;  
Nilai: 88,70
- c. Operasional Persandian.  
Nilai: 90,77

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN				
Tingkat Kepatuhan				
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	95,29		
Pengelolaan SD Persandian	:	88,70		
Operasional Persandian	:	90,77		
Total Skor		91,59	dari maks 100	
Kategori Tingkat Kepatuhan	Sangat Tinggi			
Definisi Tingkat Kepatuhan				
Sangat Tinggi	91-100	level 5		
Tinggi	76-90	level 4		
Cukup	61-75	level 3		
Kurang	51-60	level 2		
Sangat Kurang	0-50	level 1		

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

<b>Tata Kelola dan Kerangka Kerja</b>		<b>95,29</b>
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	100,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	86,67
<b>Pengelolaan SD Persandian</b>		<b>88,70</b>
SDM Sandi	:	80,00
Materiil Sandi dan JKS	:	88,57
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	100,00
Tempat Kegiatan Sandi	:	92,00
<b>Operasional Persandian</b>		<b>90,77</b>
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	92,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	86,67
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	92,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 2. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta



Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

Mohamad Nur Afif, S.ST.  
NIP. 198701152007011001

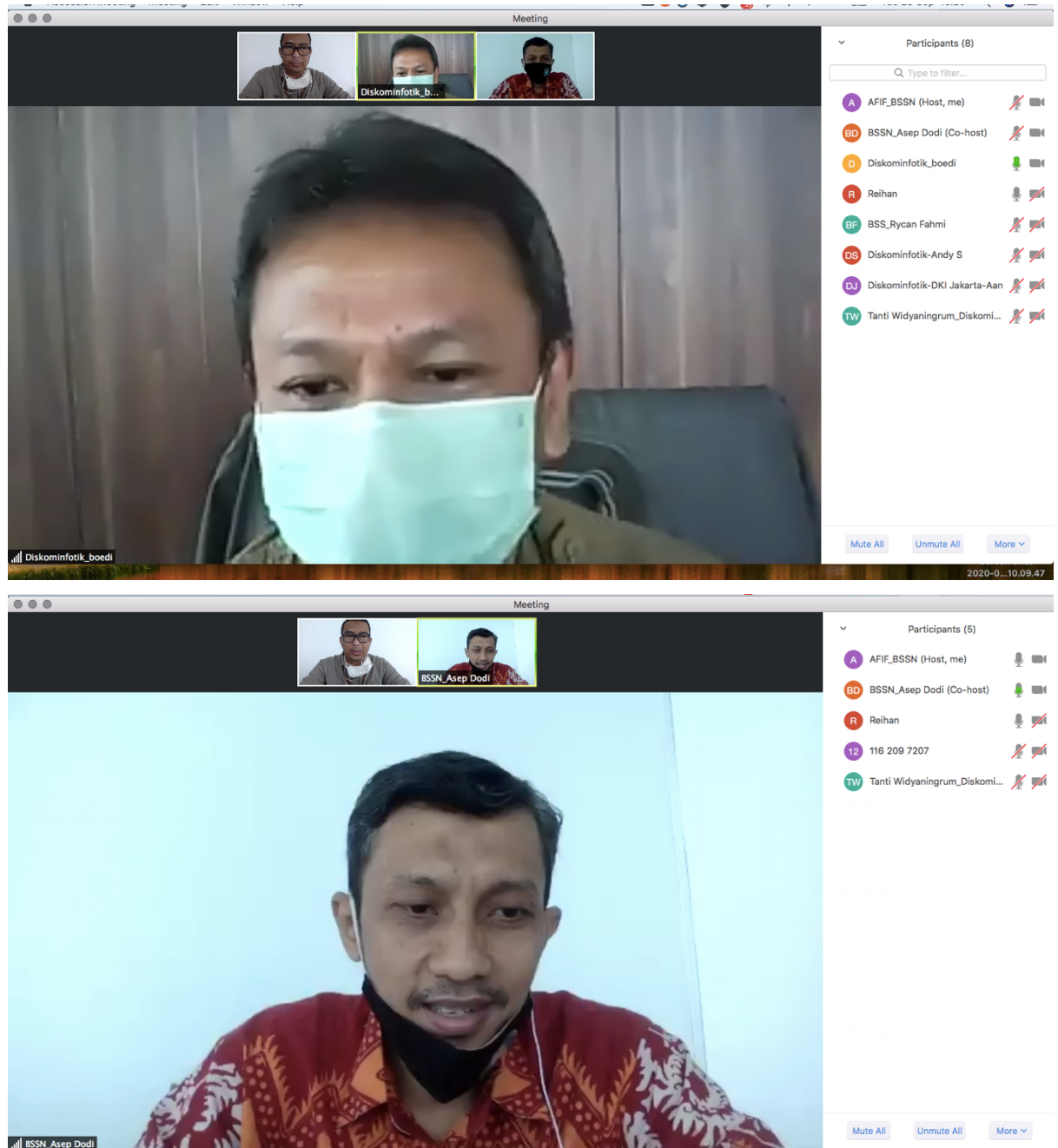
R. Boedi Setyawan  
NIP. 197009171998031006

Mengetahui,  
a.n Direktur Proteksi Pemerintah  
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

Danang Jaya, S.Si., M.Kom  
NIP. 19731230 199312 1 001

**LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**1. Dokumentasi Video Conference 29 September 2020**



**2. Dokumentasi Pengiriman Bukti Audit cloud Pemprov DKI Jakarta**

